

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN

Ade Anandayu

Guru di SMP Negeri 2 Wonogiri

ABSTRAK

Pendidikan dapat dipahami sebagai upaya manusia mentransformasikan atau mengubah kemampuan potensial seseorang menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup lahir batin. Sebagai proses, maka didalam pendidikan ada salingtindak (interaction) fungsional antar komponen pendidikan yang berinterdependen satu sama lainnya. Sesuai fungsinya menyongsong hari esok, maka pendidikan selayaknya dilandaskan bukan saja pada apa yang diketahui oleh pendidik/guru/dosen tentang hidup dan kehidupan, melainkan juga pada apa yang dikehendaki dari hidup dan kehidupan itu.

Kata Kunci: Pendidikan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian inheren sejarah peradaban umat manusia. Makna pendidikan secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan yang melingkupinya. berdasarkan alur pikir yang demikian dapat dikonstatir bahwa bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, didalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan.

Pada dasarnya proses pendidikan adalah proses transformasi atau proses perubahan kualitas tingkah laku individu (Edgar Faure, et. al, 1981). Perubahan tingkah laku yang diharapkan bukanlah sekedar perubahan dalam penambahan jenis tingkah laku, tetapi perubahan structural yang berkenaan dengan perubahan dalam pola tingkah laku atau pola kepribadian yang makin sempurna. Transformasi pendidikan tidak hanya dimaksudkan agar seseorang makin banyak mengerti tentang segala sesuatu, tetapi terutama agar seseorang tersebut makin memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir batin dalam peranannya sebagai pribadi, warga masyarakat, warga Negara.

Atas pijakan yang demikian, maka proses pendidikan dapat dipahami sebagai upaya manusia mentransformasikan atau mengubah kemampuan potensial seseorang menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup lahir batin. Sebagai proses, maka didalam pendidikan ada salingtindak (interaction) fungsional antar komponen pendidikan yang berinterdependen satu sama lainnya. Sesuai fungsinya menyongsong hari esok, maka pendidikan selayaknya dilandaskan bukan saja pada apa yang diketahui oleh pendidik/guru/dosen tentang hidup dan kehidupan, melainkan juga pada apa yang dikehendaki dari hidup dan kehidupan itu (Rakajoni, 1992).

Memang, agak ironis jika andaian (asumsi) di atas dipadukan dengan praktek pendidikan/pengajaran yang terjadi saat ini, dimana putusan-putusan dan tindakan-tindakan instuksional yang digagas dan dilaksanakan oleh para pendidik tidak didasarkan pada andaian-andaian kependidikan yang eksplisit, melainkan diturunkan saja dari pengalaman pribadi, kalau tidak sepenuhnya dikendalikan atau lebih tepat diombang ambingkan oleh

rentetan kebetulan dan kecelakaan, atau serangan konseptual serta godaan pragmatis, sehingga sangat mudah mempengaruhi keputusan serta tindakan guru/dosen yang kurang mantap wawasan kependidikannya. Pada akhirnya proses pendidikan bukan lagi sebagai proses transformasi tingkahlaku tetapi lebih menyerupai proses domestikasi yang menjebak para guru/dosen pada pekerjaan rutin yang bersifat mekanistik. Realitas objektif ini agaknya memiliki tautan dengan pendidikan subyektif masyarakat akan pendidikan formal. Misalnya dalam pendidikan tinggi, masyarakat kurang peduli terhadap proses pendidikan yang terjadi, yang penting putra/putrinya berhasil menyandang gelar sarjana. Pola pikir seperti diatas juga telah muncul pada abad 19 melalui pemikir-pemikir neo Marxism yang dipelopori oleh Bowles, Gintis dan Cain yang terkenal dengan teori Screening Hypothesis dan teori Dual Labor Market Hypothesis yang hanya melihat keluarannya sebagai asset, tanpa menghiraukan proses pendidikan (Wardiman dan Suryadi, 1995). Tahapan selanjutnya setelah mahasiswa berhasil menyandang gelar sarjana merupakan dimensi baru yang lepas dari rangkaian proses pendidikan formal, dimana orang tua/masyarakat dan guru/dosen tidak lagi ikut bertanggung jawab. Dalam kerapatan makna yang demikian banyak guru/dosen mendaku (claim) tindakannya sebagai tindakan profesional yang derajat akuntabilitasnya dapat ditakar berdasarkan pedoman teknis mengelola proses belajar mengajar yang dikeluarkan oleh Depdiknas.

- Pada umumnya setelah ujian atau tes semester selesai, orang tua selalu menanyakan besaran indeks prestasi putra/putrinya. Pertanyaan ini menjadi sangat watajar, lantaran orang tua tidak mengetahui indikator lain untuk mengukur kemajuan pendidikan anaknya. Sayangnya para guru/dosen juga terjebak pada pola pikir yang sama, lantaran cara ini dianggap paling mangkus dan sangkil karena memiliki bobot kebenaran (transparan) yang dapat dipertanggung jawabkan. Memang dalam prinsip perencanaan oleh Ferari and Lancaster (1988) dikatakan " recovery of cost principles", tetapi persoalannya adalah apakah pengembalian investasi oleh anak hanya dalam bentuk indeks prestasi yang dapat dikuantifikasi? Bagaimana dengan perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, nalar, logika, kepribadian ? yang oleh pakar pendidikan sering dikemas dalam bahasa performance intellectual, performance sosial ? agak aneh jika kita menemukan seseorang mahasiswa yang memiliki IP tinggi tapi bertingkah laku seperti anak TK jika keinginannya tidak dituruti oleh orang tuanya. Kalau sudah demikian, siapa yang bertanggung jawab?
- Banyak ditemui sarjana yang tidak mampu membuat surat lamaran kerja, hingga mereka harus menyewa orang lain untuk membuatnya. Kenyataan ini memang sangat memilukan, lalu apanya yang salah dalam proses pendidikan?. Apakah proses pendidikan kira berorientasi pada inarticulate genius, dimana mahasiswa menguasai konsep pengetahuan dengan baik tapi tidak mampu menyatakan secara verbal, atau orientasi pendidikan pada articulate idiecy dimana mahasiswa pandai menyatakan secara verbal tetapi kurang penguasaannya terhadap konsep pengetahuan secara benar (Richey, 1968).

Mestinya kedua orientasi di atas harus diramu dan dikemas dalam suatu anyaman proses belajar mengajar di kelas, karena disitulah mahasiswa dibentuk untuk mulai berkarya, kreatif, memiliki inisiatif, dinamis, menjadi inovator dan memiliki attitude dalam pembangunan (Noto Hamidjojo, 1974). Bagaimana pembangunan atau kebudayaan bisa berkembang, kalau proses pembenahan SDM kurang diletakan secara proposional dalam bingkai kependidikan yang tepat?

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua konsep yang memiliki tautan kausalitas, "sekaligus merupakan harta termahal yang dimiliki manusia dalam kehidupannya" (Soedjatmoko, 1991). Bila pendidikan suatu masyarakat maju atau berkembang dengan baik, akan mengakibatkan kebudayaan berkembang ketingkat yang lebih tinggi. Atau sebaliknya, semakin maju atau berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat akan mengakibatkan semakin berkembang pula praktek pelaksanaan kegiatan pendidikan pada masyarakat tersebut.

Fungsi pendidikan yang paling luas adalah bertindak sebagai penjaga dan penerus sumber-sumber daya cultural tertentu dari masyarakat. Pengangkatan seseorang yang secara kultural belum dibentuk, ketingkat orang "dewasa" yang mampu, adalah aktivitas yang merupakan dasar pembentukan pendidikan secara formal. Atas dasar itu pendidikan formal adalah suatu usaha untuk melakukan secara ekplisit dan sistematis apa yang sejak lama dilakukan keluarga dan masyarakat tanpa diferensiasi sebelum masyarakat menjadi begitu kompleks, sehingga tugas itu harus dilakukan oleh para spesialis.

Dari semua hubungan pendidikan dan masyarakat, fungsi primordial dalam transmisi kebudayaan adalah yang paling serius diganggu oleh kekuatan-kekuatan modern. Untuk sebagian fungsi ini bergeser ke lembaga – lembaga lain, misalnya sub sistem pendidikan muncul dan berkembang dalam lembaga-lembaga pekerjaan "dewasa" seperti lembaga politik. Pada pilihan lain terjadi indoktrinasi cultural yang tidak sistematis lewat media massa, radio, film, dimana pengajaran dikombinasikan dengan hiburan dan perdagangan. Campuran media yang bersaing dengan sekolah dan mempengaruhi siswa adalah baru, dan jangkauannya universal. Si anak setiap hari mendengar media yang membentuk selera dan menyalurkan pengetahuan; suatu bagian penting dari kebudayaan temurun (tradisional) yang saat ini mengalami modifikasi terutama lewat saluran-saluran baru. Hal itu oleh Korten (1997) disebut sebagai pengaruh korporasi internasional yang mulai merambah dunia pendidikan.

Penyaluran kebudayaan juga menjadi bagian dalam sistem pendidikan karena pengajaran formal diperluas dan di diferensiasi untuk menyiapkan orang-orang untuk pekerja ahli. Orang harus disosialisasikan secara berbeda-beda dengan meluasnya varietas status "dewasa" (politik, social, budaya dsb). Sekolah formal merupakan penyalur utama kebudayaan khusus yang tersistematisasi secara konseptual. Namun berkenaan dengan eskalasi kepentingan global saat ini, ilmu-ilmu humaniora menjadi kurang liberal karena maraknya ilmu yang mengembangkan keahlian dalam bidang yang sempit. Tendensi-tendensi ini lebih melemahkan daripada memperkuat pengertian kaum terdidik, karena para ahli berbicara dalam bahasa esoteric dan mengarahkan pandangan mereka pada perspektif khusus (Freire, 1985). Hubungan pendidikan dan kebudayaan mungkin paling banyak diubah, bukan oleh perubahan-perubahan dalam penyaluran warisan tetapi oleh perluasan usaha menciptakan pengetahuan. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi/universitas menjadikan pendidikan suatu kekuatan aktif dan intensif baik dalam mengembangkan kebudayaan maupun urusan-urusan social budaya dan politik.

STRATIFIKASI DAN MOBILITAS SOSIAL

Perbincangan tentang stratifikasi social dalam era yang semakin mengglobal seperti sekarang ini, menyimpang berbagai pertanyaan esensial tentang konsep kemanusiaan

macam apa yang digunakan untuk memaknai kehidupan ini sebenarnya? Sementara realitas kehidupan itu sendiri mengindikasikan adanya perbedaan status social yang sulit dihindari, manakala kita berbicara tentang sesuatu yang merupakan hak setiap orang, tetapi harus menerima perlakuan yang berbeda. Di Amerika serikat, Negara yang dianggap tempat bersemayanya konsep demokrasi, terdapat beberapa lapisan masyarakat. Pelapisan masyarakat didasarkan pada darah biru (ningrat) atau jelata, mungkin juga disebabkan faktor kepemilikan harta (kaya atau miskin). Kedudukan seseorang dalam tangga masyarakatnya tidak sedikit mempengaruhi pola pemikiran, pendidikan, sikap dan tingkah lakunya.

Havighurts (1972) menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan dan sekolah pada berbagai lapisan masyarakat, berbeda. Lapisan teratas memandang pendidikan lebih sebagai peningkatan pribadi atau prestise daripada sebagai persiapan suatu jabatan atau pekerjaan. Bagi lapisan menengah atas pendidikan itu sangat penting bagi perolehan dan pemantapan kariernya. Dan tidak sedikit dari mereka dapat mencapai lapisan menengah atas dengan bermodalkan pendidikan yang baik. Lapisan menengah bawah memandang pendidikan/sekolah sebagai hal yang esensial untuk mendapatkan pekerjaan dan atau jabatan yang baik dan oleh karena itu perhatian mereka terhadap pendidikan sangat besar. Lapisan rendah memandang pendidikan memang perlu, tetapi karena sering perhatian terhadap sekolah terdesak oleh kebutuhan untuk makan atau pencaharian kehidupan sehari-hari, menyebabkan angka putus sekolah dari lapisan ini sangat tinggi. Mayoritas bangsa Indonesia berada pada lapisan menengah bawah atau lapisan rendah. Jikalau mayoritas ini tidak mengenyam pendidikan yang memadai, bisa dibayangkan hasil karya macam "apa" yang dapat diproduksi. Bagaimana kebudayaan suatu masyarakat berkembang dengan baik jikalau tingkat pendidikan mayoritas anggota masyarakatnya rendah.

Kebijakan pemerintah Indonesia secara makro memang menyentuh kepentingan mayoritas lapisan menengah bawah dan lapisan rendah, karena pada dasarnya pempunahan (focus) masih berada pada tataran menikmati kesempatan memperoleh pendidikan dan bukannya kesempatan menikmati layanan pendidikan yang berkualitas. Equality of access yang sering ditampilkan sebagai angka partisipasi kasar belum diikuti oleh equality of survival apalagi equality of output lebih merupakan keinginan daripada kenyataan (Umbu Tagela, 2000). Pada pilahan seperti ini muncul berbagai persoalan yang senantiasa tidak kunjung selesai mendera lembaga pendidikan formal, seperti; masalah kependanaan (relevansi) kemangkusan (efektivitas), kesangkalan (efisiensi), financial, kualitas. Masalah-masalah ini berada pada sumbu lingkaran yang sama sehingga upaya mencari pemecahan atau solusi untuk menyelesaikan suatu masalah akan mengorbankan keragaan dari masalah yang lain, ibarat mengurangi benang kusut, yang tidak pernah selesai. Dalam tautan yang demikian hamper dapat dipastikan kebudayaan akan mengalami stagnasi atau berjalan ditempat kalau tidak mau disebut masih temurun atau tradisional.

Masalisisasi pendidikan diindonesia yang ditunjukkan dengan tingginya angka eksplosif anak usia sekolah dengan derajat enrollment yang variatif selain sebagai hak seperti tertera dalam UUD 45, juga merupakan akibat dari suatu penderitaan panjang menyaksikan betapa kaum penjajah dan segelintir bangsa kita yang beruntung menikmati pendidikan yang membawa mereka ke tangga status social tertentu dalam masyarakat, sekaligus untuk menghadirkan rumpang (gap) dan rasa kecemburuan social yang sangat dalam membekas hingga saat ini. Kita dapat menikmati betapa besar animo lulusan pendidikan tinggi yang

ingin menjadi pegawai negeri sipil, seolah-olah status PNS merupakan solusi untuk keluar dari lingkaran kemeralatan. Fenomena ini merupakan salah satu warisan konflik kepentingan yang dikemas dalam suatu nuansa historis, sehingga nyaris luput dari amatan para sosiolog dan sejarawan.

Dalam tautan makna yang sama, misalnya, pada abad ke 20 muncul aliran baru dalam pendidikan sebagai counter attack terhadap kondisi pendidikan di dunia industri yang tergolong maju, yang dipelopori oleh Philip Coombs, Ivan Illich, Paulo Freire dan Everett Reimer. Keempat tokoh tersebut menyoroti peranan sekolah dengan mengenyam pendidikan. Salah satu konsep yang terkenal pada waktu itu adalah custodial care (Everett Reimer, 1987) yang merupakan program layanan pendidikan yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan masyarakat, dilaksanakan dalam suatu lembaga untuk memelihara anak-anak nakal dan anak-anak tak mampu. Persoalan penting menurut Everett Reimer adalah "it isn't what you do, it's the way that you do it."

Mobilitas penduduk secara horizontal dapat diamati lewat berbagai kebijakan pemerintah seperti migrasi, transmigrasi, atau urbanisasi sebagai akibat sentralisasi ekonomi dan sejenisnya yang dibungkus dalam kemasan politik, sering menimbulkan persoalan baru seperti transmigrasi di Irja, di Kalbar, Kalitum, Kalteng. Setiap gerak mobilitas horizontal dalam bentuk apa saja pasti membawa serta persoalan yang membutuhkan penanganan serta seksama oleh aparat terkait. Persoalannya sangat beragam; pendidikan, social, budaya, ekonomi, politik, masalah HAM dan sebagainya. Berbeda dengan mobilitas vertical yang didasarkan pada capaian, prestasi kerja, kualitas individu atau karena status pemberian atau status warisan. Mobilitas vertical relative bergerak agak lambat di setiap daerah, bahkan pada jaman ORBA sempat diatur oleh kekuatan dari pusat. Sebagai misal, gubernur lampung di jabat oleh putra Indonesia suku Jawa, walaupun putra lampung sendiri amat siap untuk jabatan itu. Fenomena empirik di atas merupakan salah satu bisul eksklusif yang menjadi pemicu meledaknya gejala social di daerah yang akhir-akhir ini menjurus ke arah disintegrasi bangsa.

Merujuk pada paparan tersebut di atas, muncul persoalan yakni, apakah sistem pendidikan berfungsi pertama-tama sebagai suatu pranata warisan social yang memantapkan kedudukan social melintas generasi-generasi atau sebagai suatu pranata mobilitas social yang menunjuk anak-anak pada status berlawanan dengan status orang tua mereka? apapun arti lain pendidikan dalam masyarakat industri maju, pendidikan tetap pada nilai dasarnya yaitu persamaan (Naisbitt, 1997) ketidaksamaan massif timbul dalam masyarakat modern bila terdapat banyak perbedaan dalam jumlah dan mutu sekolah antar desa dan kota atau antara Jawa dan luar Jawa. Dari hasil riset diperoleh gambaran adanya perbedaan yang mendalam dan sistematis dalam kemampuan untuk dididik yang merupakan akibat lingkungan pra sekolah dan luar sekolah yang dini.

PERUBAHAN SOSIAL DAN INTEGRASI SOSIAL

Makin besar jangkauan pranata pendidikan, makin kompleks hubungannya dengan tertib social. Sekolah semakin banyak melakukan fungsi-fungsi luas untuk masa penduduk yang dahulu dilakukan oleh keluarga masyarakat dan agama. Sistem pendidikan yang mangkus (efektif) secara social akan menjadi sarana perubahan teratur melintasi dan kelas dan kelompok-kelompok elit. Akan tetapi sistem itu akan memperlemah masyarakat, akibat kurangnya artikulasi atau ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Terlalu banyak orang

yang dididik di bawah tingkat pengetahuan umum yang fungsional dalam masyarakat industry yang maju, kemungkinan akan menciptakan suatu masa tenaga tak terdidik yang kurang cocok untuk penataan pekerjaan dan latihan ulang yang menyebar dalam ekonomi modern (Cummings, 1980). Penyesuaian untuk sebagian adalah suatu masalah bagaimana lembaga pendidikan menghadapi perubahan social yang cepat. Menurut manheim (Priyono, 1979) sekolah masa lampau adalah suatu tempat latihan untuk menyesuaikan diri dengan suatu masyarakat yang mapan dengan cara meniru. Sedangkan sekolah modern adalah suatu pengantar untuk suatu masyarakat yang telah dinamis. Mengadopsi tradisi semata-mata secara potensial adalah kurang terintegrasi, karena itu pengetahuan baru harus dimasukkan dalam kurikulum yang bersifat koheren. Orang harus memperkirakan tingkah laku yang tepat untuk hari depan yang tidak dikenal dan secara demikian meningkat tekanan untuk mendidik bagi adaptabilitas outputnya. Akan tetapi hal itu merisikir kehilangan nilai-nilai yang telah beradab-adab, diskontinuitas cultural dan krisis dalam identitas pribadi, keluesan suatu cita-cita yang diisyaratkan dengan perubahan cepat, bisa menimbulkan kekacauan atau kaos. Integrasi social dalam dasar-dasar pengajarannya sebagian tergantung pada kemampuan sekolah untuk meramu keluesan adaptif dengan penuruan mantap masa lalu sambil menghindari individualism maupun ortodoksi kebudayaan.

Pendidikan menghadapi banyak kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang kompleks penyesuaiannya kesatu arah, bisa menimbulkan ketegangan serius pada arah yang sama. Bisa menimbulkan ketegangan serius pada arah yang lain. Pendidikan dan ekonomi memiliki kaitan erat dalam masyarakat maju, menjadikan pendidikan suatu tempat pembinaan bakat, suatu perusahaan pemrosesan orang yang massif yang menyiapkan tenaga-tenaga untuk spesifikasi kebutuhan pekerjaan dan cetak biru pemerintah. lembaga pendidikan secara perlahan tapi masih mengalami erosi idealism dari sebuah lembaga social menjadi lembaga bisnis yang berorientasi profit. pola atau modern demikian, hampir tidak mengganggu mahasiswa yang hanya memikirkan vocational, tetapi secaraserius mengganggu minat intelektul dosen dan mahasiswa, kaum muda idealis yang memikirkan identitas pribadi mereka dan keadilan social dalam masyarakat, merasa kurang dilayani oleh sistem pendidikan yang diikat dengan kebutuhan-kebutuhan material dan kemajuan tehnologi. Atas dasar pemikiran makul (rational) yang demikian pada waktu pendidikan menjadi mapan, mereka ikut menimbulkan ketidakpuasan dan alienasi intelektul.

Apabila sistem memiliki terpesona dengan tuntutan pekerjaan atau market, dia juga akan melupakan kebutuhan-kebutuhan orang diluar pekerjaan. pada pilahan seperti ini, pendidikan harus juga belajar member kontribusi pada penggunaan waktu senggang dan kemilitan (ingin tahu) seseorang tentang makna kehidupan ini secara baik, namun orientai pada kewajiban dan acara ketat sekolah-sekolah yang terikatdengan tenggat menyiapkan kaum muda untuk pekerjaan birokrasi, dan mencari uang, bertentangan dengan sensitivitas yang cocok untuk penggunaan waktu senggang (Ilick, 1982).

Banyak bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin baik yang baru maupun yang sedang mengalami modernisasi, merasa bahwa sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan perubahan nasional. sistem pendidikan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan orang-orang terdidik bagi sector-sektor yang meluas dari suatu struktur pekerjaan yang cepat berubah. khususnya orang-orang yang punya kemampuan memimpin pemerintahan modern dan industry. Apapun maksud lain pendidikan dalam masyarakat modern, tujuannya adalah integrasi nasional dan kompetensi modern

yang saat ini cenderung menjurus ke arah maya atau virtual. Akhirnya pendidikan telah menjadi suatu kekuatan yang sangat kreatif dalam masyarakat dan dapat melayani industry dan pemerintahan. tetapi para ahlinya juga menciptakan sikap-sikap yang kritis terhadap cara-cara yang telah mapan dan memperkrnalkan cita-cita dan lembaga-lembaga kebebasan kepada kaum muda. Sistem pendidikan yang kompleks dapat membimbing kearah perubahan maupun stabilitas yang diinginkan. gagasan kritis disamping peniruan tanpa pemikiran, diskontinuitas serta erupsi disamping kontinuitas, mendeskripsikan perkembangan yang sangat lamban.

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

Pendidikan merupakan entrypoint bagi pembangunan suatu bangsa. Andalan ini telah terbukti oleh jepang sejak jaman Tokugawa (1600) dan berhasil menyejajarkan jepang dengan Negara maju seperti amerika serikat, jerman, prancis dan inggris (Cummings, 1984). sebaliknya andaian tersebut diindonesia kurang dapat diterima akibat pembenaranegositas keilmuan yang bermuansa politik. pendidikan, ekonomi dan stabilitas ditempatkan pada sumbu lingkaran yang sama, dalam arti; pembangunan bidang pendidikan tidak akan berhasil jika pembangunan ekonomi kurang berhasil. Demikian pula pembangunan ekonomi tidak berhasil jika stabilitas keamanan sebagai prasyarat kurang mantap. Sebaliknya pembangunan ekonomi tidak berhasil jika tidak ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Demikian pula stabilitas keamanan tidak dapat dicapai jika kondisi ekonomi bangsa terpuruk dan kualitas sumber daya manusianya rendah.

Dalam kerangka piker seperti itulah ketiga komponen diatas berjalan seiring dalam praktek pembangunan selama ORBA. Namun karena jargun politik ORBA berkiblat pada pembangunan ekonomi maka selama ORBApembangunan ekonomi menjadi entry point dalam pembangunan nasional. Kondisi obyektif ini akhirnya menghadirkan masalah yang sangat serius setelah munculnya UU. NO. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya otonomi daerah. salah satu persoalan utama otonomi daerah adalah sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun dalam kualitas (Umbu Tagela, 2000). Dalam tautan makna yang sama, Napitupulu (1997) mengatakan tantangan besar yang bakal dihadapi bangsa Indonesia di masa depan adalah: (1). Tantangan yang bersumber dari kehendak kita untuk mencapai keunggulan dalam pembangunan nasional, peningkatan terus menerus pertumbuhan ekonomi dan produk nasional, sehingga mampu memasuki persaingan global, (2). Tantangan yang bersumber dari transformasi budaya, yaitu dari masyarakat agraris ke masyarakat industry, (3). Tantangan yang di timbulkan oleh golongan globalisasi, gejala di mana batas-batas politik dan perekonomian antar bangsa menjadi lebih transparan, (4). Tantangan akibat munculnya Kolonialisme baru dalam bentuk kolonialisme ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Keempat tantangan tersebut diatas memiliki hubungan yang signifikan dengan dunia pendidikan, karena bermuara pada tuntutan tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam kerampatan makna yang sama mantan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sambutan pada hari pendidikan nasional tanggal 2 mei 2000 mengatakan selama 32 tahun pembangunan pendidikan di Indonesia di nomor duakan. Abdurrahman Wahid jugamengatakan sudah saatnya kita bangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Para pemerhati masalah pendidikan, para pakr pendidikan dan pekerja dalam dunia pendidikan menyambut gembira pendapat yang dilontarkan oleh mantan presiden tersebut. Sembari

berharap agar sikap etatisme, sentralisme dan berbagai instrument kekuasaan yang disebar dalam berbagai kemas pendidikan segera dihentikan untuk member ruang gerak terciptanya otonomi dalam bidang pendidikan.

PENUTUP

Peningkatan mutu pendidikan sebenarnya telah menjadi kepedulian sejak awal dilaksanakannya upaya-upaya terencana dalam pembangunan. Sayangnya, walaupun semua sepakat bahwa mutu pendidikan harus ditingkatkan, cara-cara bagaimana sasaran itu diwujudkan belum tergambarkan secara jelas sehingga dapat menjadikan pegangan dalam menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu, maupun untuk menagih pertanggungjawaban keberhasilannya. Bahkan consensus mengenai atribut atau perangkat cirri-ciri penting keluaran pendidikanpun masih belum diletakkan secara cukup mantap. ada yang berbicara kesiap pakaian, ada yang mrngatakan kesiaplaitihan, kesiap mandirian, menjadi kreatif, disamping adapula yang menekankan pada nilai tambah, manusia unggul. Hal terakhir ini agak mengabaikan manusia "biasa-biasa" yang justru merupakan mayoritas didalam setiap unit populasi. Era saat ini disebut sebagai era reformasi (perubahan yang menyeluruh dalam waktu relative lama). Atas pijakan yang demikianlah kita menaruh harapan besar pada kepedulian Presiden Megawati tentang kondisi obyektif pendidikan di Indonesia.

Dalam kerangka yang sama, perlu kejelian berpikir dari semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan formal, agar kita tidak perlu mengulangi kekeliruan yang pernah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Cummings, William. K, 1984, Pendidikan dan Kualitas Manusia di Jepang, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Everett Reimer, 1987, Sekitar Eksistensi Sekolah, Yogyakarta, Nanindita
- Feire and Lancaster, 1988, Management Of Training Institutions, Turin, ILO.
- Feire, Paulo, 1985, Pendidikan Kaum Tertindas, Jakarta, LP3ES
- Faure Edgar, Felipe Herrera, Kaddaoure, Henri Lopes, Petrovsky, Majid Rahnema, Fredrck C. Ward, 1981, Belajar Untuk Hidup, Dunia Pendidikan Hari Ini dan Esok, Jakarta, Bharata Karya Aksara
- Havighurst, 1972, Developmental Task and Education, 3, ed, New York, David Mckay.
- Illick, Ivan, 1982, Bebas Dari Sekolah, Jakarta, Sinar Harapan
- Korten. David, 1997, When Corporations Rule The World (Bila Korporasi Menguasai Dunia, Terjemahan Agus Maulana), Jakarta, professional Books.
- Naisbitt, John, 1997, Megatrends Asia, Jakarta, Gramedia
- Napitupulu, W, P, 1997, Mengantisipasi Era Globalisasi, (Dalam Exelsior) Volume II, Oktober
- Noto Hamidjojo, O, 1974, Attitude Dalam Pembangunan, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Onny, S, Priyono, 1979, Suatu Prespektif Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Majalah Analisi, CSIS NO. 11

- Richey, 1968, *Planning For Teaching*, New York, Mc Graw Hill Company.
- Rakajoni, T, 1991, *Potret Pendidikan Masa Kini Dan Prospek Masa Mendatang*, (Makalah pada Hardiknas, FKIP-UKSW 1991)
- Soedjatmoko, 1991, *Manusia Dan Dunia Yang Sedang Berubah*, Dalam seri *Pemikiran Pendidikan, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad ke XXI*, Jakarta, Grasindo.
- Umbu Tagela, 2000a, *Mengantisipasi Otonomi Daerah*, (Dalam *Majalah Kritis*) Volume XII NO. 3, Maret.
-, 2000, *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Model Rate Of Return*, (Dalam *Majalah Dan Ekonomi*)Volume VI. NO. 1. Maret.
- Wardiman dan Suryadi, 1995, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan*, Jakarta, Depdikbud.

